KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rezim Pemilu atau Pemilunya Rezim?
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Rezim Pemilu atau Pemilunya Rezim?

Arya Budi
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Research Fellow Electoral Integrity Project 2022-2023

Hingga kini RUU Pemilu seolah menjadi isu pinggiran.

Memang banyak isu lain yang tak kalah mendesak di Indonesia, seperti buruknya kondisi ekonomi, ambivalensi kebijakan luar negeri, atau ancaman atas HAM. Mungkin karena 2024 telah berlalu dan 2029 terasa masih jauh, peserta diskusi soal RUU Pemilu beberapa waktu lalu di selasar Fisipol UGM juga kalah jumlah dari kelompok mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliah. Seolah pemilu adalah isunya para spesialis atau sarjana politik.

Sepinya soal ini—meski digaungkan terus oleh kelompok masyarakat sipil—juga terjadi di Senayan, ketika para wakil rakyat hanya samar membicarakannya, apalagi membahasnya. Padahal, RUU Pemilu lebih dari sekadar ambang batas para caleg partai bisa masuk Senayan, atau peta pencapresan pascaputusan MK soal *presidential threshold* 0 persen.

Heningnya RUU Pemilu di tengah berbagai amar putusan MK, agenda reformasi, hingga tenggat pergantian anggota KPU pada April 2027, memaksa kita wajib waspada karena rezim pemilu bisa saja berakhir menjadi "pemilunya rezim". Ada beberapa celah dan alarm atas malapetaka politik itu. Celah tersebut harus kita tutup dan alarm hari kita bunyikan.

Celah pertama adalah penguasaan institusi legislatif yang sering terjadi melalui perkara basis penentuan daerah pemilihan, baik berdasarkan cakupan geografis maupun komposisi pemilih di dalamnya.

Ada dua perkara dapil yang sering diungkap ilmuwan politik. Pertama adalah *gerrymandering*, yaitu cakupan geografis dapil yang menguntungkan penguasaan, dengan garis batas dapil baik untuk cakupan kabupaten maupun kecamatan, misalnya, dibuat berdasarkan basis pemilih penguasa.

Kedua adalah *malapportionment*, besarnya alokasi kursi berdasarkan basis pemilih yang menguntungkan penguasa. Alokasi kecil dibuat di daerah basis dan alokasi besar di daerah lawan, sehingga secara agregat penguasa lebih mudah mendapat kursi daripada lawan.


HERYUNANTO

Malaysia adalah negara terdekat yang paling gamblang merawat celah "pemilu rezim" menggunakan dapil. Setelah kekalahan partai UMNO yang didominasi etnis Melayu dari partai DPP dengan banyak simpatisan etnis China—hingga berakibat pada kerusuhan berdarah pada 1969—pemilu kembali digelar dan UMNO akhirnya menang dan membentuk koalisi besar Barisan Nasional (BN) di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad.

BN terus menang pada pemilu selama puluhan tahun akibat *gerrymandering* dan *malapportionment* yang kuat, sebelum kalah di 2018 menyusul skandal besar dan konflik elite pada tubuh koalisi BN, dan memberi insentif bagi kelompok oposisi di bawah Anwar Ibrahim.

Tentu ada banyak contoh lain, termasuk Amerika Serikat ketika awal abad ke-19 Gubernur Massachusetts Elbridge Gerry menggambar ulang salah satu dapil di negara bagian demi partainya, dan tak sengaja menciptakan gambar seperti salamander—yang jadi asal-usul istilah *gerrymandering* ini.

Celah kedua yang paling mudah kita deteksi, tetapi juga paling berbahaya, adalah potensi *offset* kekuasaan eksekutif yang berada dalam kendali penuh presiden—secara langsung ataupun tidak—terhadap seleksi dan komposisi pimpinan badan penyelenggara pemilu atau sering disebut *electoral management body* (EMB).

Badan ini di Indonesia lebih cocok merujuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)—meskipun regulasi juga memasukkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)—yang mempunyai otoritas legal dan operasional soal siapa yang masuk di dalam surat suara, siapa yang berhak memilih, dan siapa yang menang-kalah.

Kasus terbaru soal kontaminasi lembaga wasit oleh kepentingan penguasa adalah India. Laporan Electoral Integrity Project (EIP) tahun 2025 mencatat, Narendra Modi, pemimpin partai berkuasa Partai Bharatiya Janata (BJP), bahkan memasukkan dirinya dan seorang menteri dari partainya sebagai tim seleksi badan penyelenggara pemilu di India, yang berkontribusi besar pada kemenangan BJP pada 2024, sehingga kursi eksekutif tetap berada dalam kendalinya.

Lalu kenapa para otokrat (dan calon otokrat) tetap harus bersikeras menyelenggarakan pemilu meskipun kekuasaan elite telah terkonsolidasi dan tindakan koersif bisa dengan mudah dioperasikan? Ilmuwan perbandingan politik Jennifer Gandhi mengungkap, pemilu dibutuhkan untuk mengukur kekuatan massa para otokrat di akar rumput dan menjadi alat penting mengidentifikasi loyalitas kroni dan anggota koalisi. Lemahnya suara di beberapa basis dianggap sebagai indikator elite atau pemimpin di rezim berkuasa yang sedang beroperasi dengan tujuan sendiri.

Masuknya kepentingan eksekutif ke dalam penyelenggaraan pemilu sangat berbahaya karena juga akan membuka celah pertama pada desain pemilu legislatif di atas. Karena itu, hal paling minimal dari berbagai agenda reformasi pemilu pada RUU Pemilu di tengah kemunduran demokrasi saat ini adalah menutup celah masuknya kekuasaan eksekutif pada pemilu.

Secara historis, selain kasus pidana dan etik dalam sejarah KPU RI, intervensi ataupun infiltrasi eksekutif pada EMB memang belum pernah secara eksplisit terungkap. Namun, apakah potensi Pemilu 2029 terperosok ke dalam celah "pemilunya rezim" kian kecil? Ada dua alarm sudah menyala: pengalaman Pemilu 2024 dan arsitektur politik Prabowo Subianto saat ini.

Pertama, setelah dua dekade pemilu presiden pertama, pada Pemilu 2024 kita mendengar denyut operasi *stick-and-carrot* yang terjadi pada institusi dan aktor lokal, dari kepala daerah hingga desa. Yaitu, pemberian imbalan bagi siapa pun yang bergabung dan pengganjaran koersif bagi yang melawan. Praktik *power exercise* ini suka atau tidak telah "mengajari" pemerintahan eksekutif pasca-pemilu, bagaimana mengubah negara menjadi tim sukses.

Alarm kedua ialah gamblangnya konsentrasi kekuasaan di bawah Presiden Prabowo sebagai arsitektur politik Indonesia kini. Paling kasatmata, di pengujung Agustus 2025, ketika protes meledak menjadi kerusuhan di berbagai daerah terutama Ibu Kota, kita melihat bagaimana konsentrasi kekuasaan dipertontonkan. Setelah semua pejabat dan elemen politik dikumpulkan di rumah pribadi Prabowo sebagai presiden, semua ketua partai di DPR dan para petinggi lembaga penyeimbang—baik legislatif maupun yudikatif—berjajar di samping kanan dan kiri dengan Prabowo berada di tengah menyampaikan pidato.

Gambar ini menjadi manifestasi paling jelas atas fitur penting beroperasinya pemerintahan Prabowo saat ini: monolitik. Elite dan institusi yang terkonsolidasi menjadi entitas tunggal berakhir pada absennya kekuatan alternatif, apalagi kekuatan penyeimbang.